

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mengetahui keberhasilan dalam pembangunan dapat kita lihat dari seberapa besar permasalahan pada lingkup masyarakat terutama di bidang ekonomi yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa meliputi kemiskinan dan pengangguran serta seberapa banyak alat penunjang akses terhadap fasilitas pendidikan maupun kesehatan dan juga pembangunan yang dilaksanakan seharusnya bisa meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kegiatan dalam pembangunan dapat dimulai dari memperhatikan perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut situs Badan Pusat Statistik bps.go.id (2018) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 lalu dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Tambunan 2003 dalam Kacaribu (2013:2) IPM atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM tersebut. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jadi setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk.

Dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan berbentuk kepulauan, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan

manusia secara merata. Hal ini diperkuat dengan pendapatan per kapita dari daerah yang berbeda-beda, serta juga dalam pengeluaran pemerintah di daerah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan faktor dari dimensi lain juga dapat berpengaruh dalam perbedaan pembangunan ini, misalnya faktor eksternal yang bersumber dari luar negeri.

Menurut data dari situs *United Nations Development Programme* undp.org (2018) pada periode tahun 2017 posisi Indonesia terhadap Negara-negara yang berada di pengawasan PBB, Indonesia berada pada tingkat 116 dengan perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,699% atau 69,9 mengalahkan Negara Timor Leste pada urutan 132, Laos pada urutan 139, Kamboja pada urutan 146, dan Myanmar pada urutan 148. Namun, dari data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara berkembang lainnya, seperti : Malaysia pada posisi 57, Thailand pada posisi 83, Brunei Darussalam pada posisi 39, Filipina pada posisi 113 dan tertinggal jauh dari Singapura yaitu pada posisi nomor 9. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal yang disebutkan diatas, dan faktor-faktor lain. Jika dilihat data, Indonesia pada tahun 2010 hingga 2016 telah mencapai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) lebih dari nilai IPM 65 yang berarti masuk dalam kategori menengah atas. Namun, nilai IPM yang tinggi juga belum bisa menentukan apakah masyarakat dalam negara ataupun daerah tertentu terlepas dari ketimpangan sosial.

Di dalam penghitungan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dilihat dari dua metode, yaitu baru dan lama. Untuk perhitungan yang digunakan lama masih menggunakan perhitungan angka melek huruf. Sedangkan, metode yang

baru telah menggunakan perhitungan angka harapan lama sekolah. Sementara, pada metode baru pada sisi angka melek huruf sudah ditinggalkan dan Indonesia mulai pada tahun 2010 telah memakai metode yang baru dan UNDP pun telah menggunakan perhitungan baru, namun tidak semua Negara menggunakan yang baru yang menyesuaikan keadaan tersebut sesuai dengan keadaan ataupun kondisi suatu Negara.

Menurut data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik bps.go.id (2017) pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan penggunaan metode baru per provinsi di Indonesia, pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia nya yaitu sebesar 80,06 yang itu artinya nilai IPM di DKI Jakarta ini dibidang tinggi, dan untuk daerah Jawa lainnya, Jawa Timur yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang paling rendah namun masih di menengah atas yaitu sebesar 70,27. Padahal Jawa Timur adalah penyumbang pendapatan terbanyak untuk Indonesia hingga sebesar 50 %.

Namun, mengapa Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur masih rendah dibandingkan provinsi lain yang ada di Jawa ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dengan mengambil beberapa aspek yang mungkin dapat berpengaruh terhadap IPM di Jawa Timur. Dan berdasarkan masalah diatas peneliti memiliki ide untuk judul penelitiannya yaitu **“ANALISIS PENGARUH INDEKS GINI, PENDAPATAN PER KAPITA, PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Indeks gini, Pendapatan per kapita, dan Pengeluaran pemerintah secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur?
2. Manakah variabel yang sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh indeks gini, pendapatan perkapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui variabel yang sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami keadaan sekitar dengan mengetahui sumber daya manusia melalui kajian-kajian pembangunan manusia.

2. Masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai pembangunan manusia.
3. Bagi akademis, diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang.
4. Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang apa saja yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia dan ilmu-ilmu mengenai pembangunan manusia, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema pembangunan manusia di Indonesia.